



PEMERINTAH
KOTA JAMBI



RENCANA KERJA 2024

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA)



Tahun Anggaran 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan bentuk perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi dalam 1 (satu) tahun kedepan, dengan mengacu pada dokumen perencanaan daerah Kota Jambi dan dokumen perencanaan Bappeda Kota Jambi serta laporan capaian kinerja.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) ini, diharapkan pelaksanaan anggaran dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat tercapai sesuai kinerja yang ditetapkan, dan guna mewujudkan Bappeda Sebagai Lembaga Perencanaan yang Handal, Terpercaya dan Profesional serta bermanfaat bagi pembangunan Kota Jambi.

Jambi, Agustus 2023

KEPALA BAPPEDA KOTA JAMBI

SUHENDRI, SH,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700404 199601 1 002

DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Bappeda Kota Jambi Nomor 042 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Jambi Tahun Anggaran 2024.

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN SEBELUMNYA	18
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2023	
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda dalam Renstra	18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Bappeda.....	21
2.3.1 Pelayanan Bappeda	21
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Bappeda	22
2.3.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kota Jambi.....	25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah.....	40
3.1.1 Telaahan Terhadap Renstra Bappenas	40
3.1.2 Telaahan Terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jambi	43

3.1.3 Telaahan Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2024	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	46
3.3 Program dan Kegiatan	47
3.3.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan	47
3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	53
BAB V PENUTUP	56
5.1 Catatan Penting	56
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	57

LAMPIRAN :

1. Keputusan Kepala Bappeda Kota Jambi Nomor 015 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Jambi Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Jambi Tahun Anggaran 2024.
2. Keputusan Kepala Bappeda Kota Jambi Nomor 042.A Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024.
3. Pohon Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Realisasi Renja Bappeda Kota Jambi 2022.....	8
Tabel 2.	Capaian Kinerja Bappeda Kota Jambi Tahun 2022	11
Tabel 3.	(T-C.29) Review Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Relaisasi Capaian Renstra Bappeda Kota Jambi Tahun 2021-2023	13
Tabel 4.	Tabel Realisasi Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Tahun 2019-2022	18
Tabel 5.	Realisasi Capaian Indikator Sasaran RPJMD Kota Jambi Tahun 2019-2022	19
Tabel 6.	Realisasi Persentase Hasil Kajian yang Direkomendasikan sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Tahun 2019-2022	20
Tabel 7.	Realisasi Capaian Nilai PMPRB Bappeda Kota Jambi Tahun 2019-2022	20
Tabel 8.	Progres Nilai SAKIP Bappeda Kota Jambi	21
Tabel 9.	(T-C.31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Jambi Tahun 2024	27
Tabel 10.	(T-C.33) Rumusan Rencana Program Kegiatan Bappeda Kota Jambi Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	49
Tabel 11.	Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kota Jambi Tahun 2024	53

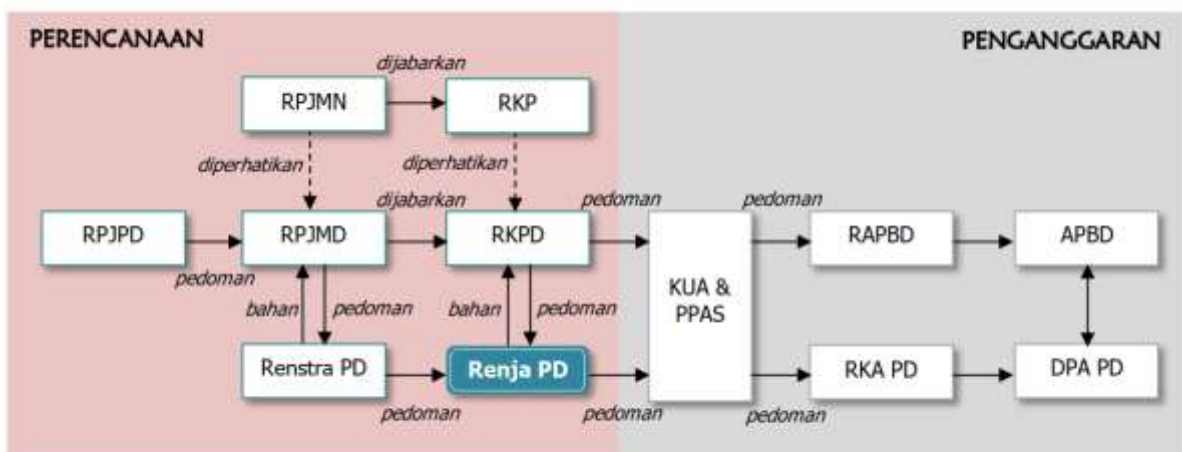
BAB I

PENDAHULUAN

1.2 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan dokumen yang secara substansial. Sebagai penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra PD, dan merupakan acuan dalam penyusunan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 273 ayat (3) bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi. Dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja.

Dalam menjalankan amanat tersebut, dan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat terlaksanakan dengan baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*), maka seluruh Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Perangkat Daerah.

Renja Bappeda Kota Jambi Tahun 2024 disusun berpedoman pada Renstra Bappeda Kota Jambi Tahun 2024-2026 dan RKPD Kota Jambi Tahun 2024. Selanjutnya Renja Bappeda Kota Jambi Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Jambi Tahun Anggaran 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Bappeda Kota Jambi Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan

- Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
 10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
 11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 4);
 12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 42);
 13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11);
 14. Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 20);
 15. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Nomor 027 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja Bappeda Kota Jambi 2024 adalah untuk menyediakan dokumen rencana kerja Bappeda Kota Jambi untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Jambi Tahun 2024 dan Renstra Bappeda Kota Jambi Tahun 2024-2026. Disamping itu pula sebagai acuan bagi bidang-bidang di Bappeda Kota Jambi dalam mendukung pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Kota Jambi secara berkesinambungan.

Adapun tujuan disusunnya Renja ini adalah mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif dan menjadi tolak ukur penilaian kinerja serta sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Jambi Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Jambi Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA JAMBI TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kota Jambi tahun 2023 dan capaian Renstra Bappeda Kota Jambi Tahun 2023, analisis kinerja pelayanan Bappeda Kota Jambi, isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Jambi, review terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA JAMBI

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, dan provinsi, serta tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Jambi.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA JAMBI

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Jambi pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksana rencana tindak lanjut serta catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya kesediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2023

Pelaksanaan Renja Tahun 2022, Untuk Urusan Perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

	Anggaran	Relaisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 10.530.940.593	Rp. 8.805.785.780	83,62%
Belanja Modal	Rp. 1.143.539.311	Rp. 893.858.724	78,17%
Total	Rp. 11.674.479.904	Rp. 9.699.644.504	83,08%

Sedangkan untuk Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 1 (satu) program, 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

	Anggaran	Relaisasi	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 683.358.616	Rp. 630.557.656	92,27%
Belanja Modal	Rp. -	Rp. -	-%
Total	Rp. 683.358.616	Rp. 630.557.656	92,27%

Program dan kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Realisasi Renja Bappeda Kota Jambi Tahun 2022

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.342.161.253	7.732.639.645	82,77
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	364.172.869	245.514.869	67,42
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.831.699	57.573.699	93,11
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	302.341.170	187.941.170	62,16
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.965.291.555	4.485.414.328	90,34
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.531.759.355	4.116.799.678	90,84
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	390.040.100	332.835.850	85,33
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	19.998.850	16.886.100	84,44
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	23.493.250	18.892.700	80,42
KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	54.034.300	40.853.800	75,61
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	49.106.700	38.104.200	77,59
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.927.600	2.749.600	55,80
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	504.257.800	271.669.428	53,88
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	159.390.000	151.630.600	95,13
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	76.567.800	56.862.200	74,26
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	144.500.000	9.996.800	6,92
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	123.800.000	53.179.828	42,96
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.839.032.497	1.594.743.499	86,72
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81.764.889	81.739.750	99,97
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	861.227.881	752.011.294	87,32
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	234.006.987	233.508.144	99,79
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.985.300	53.985.800	91,52
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.876.000	0	0,00
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	37.882.700	20.967.700	55,35
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	499.945.400	419.187.671	83,85
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48.343.340	33.343.140	68,97
KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	440.317.030	210.783.930	47,87

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	440.317.030	210.783.930	47,87
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	559.912.400	426.414.187	76,16
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.014.800	19.580.000	55,92
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	292.000.000	235.196.987	80,55
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	40.218.000	40,22
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.897.600	131.419.200	98,89
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	615.142.802	457.245.604	74,33
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	239.390.000	196.732.411	82,18
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.350.000	49.019.600	95,46
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.920.000	59.538.000	99,36
Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	150.000.000	125.496.400	83,66
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.982.802	21.959.193	21,96
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.500.000	4.500.000	31,03
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.121.299.264	945.473.911	84,32
KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	608.387.187	539.074.996	88,61
Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	268.780.287	255.480.287	95,05
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	339.606.900	283.594.709	83,51
KEGIATAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	257.731.865	195.252.139	75,76
Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	30.074.950	21.749.950	72,32
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	136.210.040	94.661.814	69,50
Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	91.446.875	78.840.375	86,21
KEGIATAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	255.180.212	211.146.776	82,74
Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	85.924.962	66.475.224	77,36
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	169.255.250	144.671.552	85,48

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.211.019.387	1.021.530.948	84,35
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	494.407.429	472.354.413	95,54
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	91.799.929	78.603.223	85,62
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	402.607.500	393.751.190	97,80
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEROKENOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	406.581.775	324.537.171	79,82
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	107.506.427	73.452.840	68,32
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20.664.767	13.238.220	64,06
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	74.454.091	50.673.459	68,06
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	203.956.490	187.172.652	91,77
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	310.030.183	224.639.364	72,46
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	204.097.326	164.206.507	80,46
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	105.932.857	60.432.857	57,05
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	683.358.616	630.557.656	92,27
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	253.915.385	236.989.146	93,33
Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	152.565.385	135.794.646	89,01
Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	101.350.000,0	101.194.500	99,85
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	48.914.630	46.974.200	96,03
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47.825.900	45.885.900	95,94
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1.088.730	1.088.300	99,96

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	96.488.000	90.638.000	93,94
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	47.213.000	44.213.000	93,65
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	49.275.000	46.425.000	94,22
KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	284.040.601	255.956.310	90,11
Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	75.887.180	56.725.436	74,75
Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	208.153.421	199.230.874	95,71
Jumlah	12.357.838.520	10.330.202.160	83,59

Realisasi anggaran selama tahun 2022 sebesar 83,59% dengan silpa anggaran sebesar Rp. 2.027.636.360,-. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif, efisien, ekonomis dan transparan serta bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama Bappeda sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Capaian Kinerja Bappeda Kota Jambi Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	22,43	22,84	101,83	18,88%
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	16,2	19,28	119,01	36,06%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100%	104,95%	108,17%	23,85%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	100%	100%	7,73%

Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi anggaran. Capaian dikatakan **efisien** jika realisasi kinerja minimal 100%, dengan angka sama atau lebih tinggi dari realisasi anggaran. Sedangkan **tidak efisien** jika capaian realisasi kinerja di bawah 100%, atau angkanya di bawah capaian realisasi anggaran.

Dengan demikian, dari hasil analisis efisiensi dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dapat disimpulkan bahwa capaian Bappeda telah efisien, hal ini dapat dilihat dari dari 3 (tiga) indikator kinerja utama Bappeda berada pada capaian yang efisien dengan realisasi kinerja diatas 100%.

Untuk melihat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kota Jambi tahun sebelumnya dan realisasi capaian Renstra Tahun sebelumnya berikut disajikan dalam Tabel.3 (T-C.29).

Tabel.3 (T-C.29) Review Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Realisasi Capaian Renstra Bappeda Kota Jambi Tahun 2021-2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (<i>out comes</i>) / Kegiatan (<i>out put</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Bappeda Tahun n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappeda s/d tahun berjalan (n-1)	
					Target Kinerja Renja Bappeda tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja Bappeda tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
A. URUSAN PERENCANAAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP BAPPEDA (Dengan Satuan:Nilai)	A	A	A	Belum dirilis (masih dalam Evaluasi Inspektorat)	100%	A	A	100%
	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Bappeda Tahun n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappeda s/d tahun berjalan (n-1)	
					Target Kinerja Renja Bappeda tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja Bappeda tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (Dengan Satuan: Dokumen)	6	6	6	6	100%	6	6	100%
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	2	2	2	2	100%	2	2	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (<i>out comes</i>) / Kegiatan (<i>out put</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Bappeda Tahun n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappeda s/d tahun berjalan (n-1)	
					Target Kinerja Renja Bappeda tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja Bappeda tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Dengan Satuan : Laporan)	4	4	4	4	100%	4	4	100%
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH KOMPONEN PERENCANAAN (Dengan Satuan: Angka)	25,50	26,15	25,40			25,50		
		NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH KOMPONEN PENGUKURAN KINERJA (Dengan Satuan: Angka)	16,99	18,24	16,80			16,99		
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai SAKIP Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan: Angka)	25,23	26,09	25,16	Belum dirilis (masih dalam Evaluasi Inspektorat)		25,23		
		Nilai SAKIP Pengukuran Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan: Angka)	16,34	18,31	16,27				16,34	
	Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian	Nilai SAKIP Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Dengan Satuan: Angka)	26,87	26,11	26,75				26,87	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (<i>out comes</i>) / Kegiatan (<i>out put</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Bappeda Tahun n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappeda s/d tahun berjalan (n-1)	
					Target Kinerja Renja Bappeda tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja Bappeda tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai SAKIP Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA (Dengan Satuan: Angka)	& 18,07	& 17,79	& 17,82		& 18,07	&		
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai SAKIP Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan: Angka)	24,4	26,24	24,48		24,4	&	&	
		Nilai SAKIP Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan: Angka)	& 16,57	& 18,63	& 16,32	&	& 16,57	&	&	
B. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
	PROGRAM PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KAJIAN YANG DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rekomendasi hasil kajian bidang bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan (Dengan Satuan: Dokumen)	2	2	2	2	100%	2	2	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (<i>out comes</i>) / Kegiatan (<i>out put</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Bappeda Tahun n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Bappeda s/d tahun berjalan (n-1)	
					Target Kinerja Renja Bappeda tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja Bappeda tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rekomendasi hasil kajian bidang sosial budaya dan kependudukan (Dengan Satuan: Rekomendasi)	2	2	2	2	100%	2	2	100%
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rekomendasi hasil kajian bidang ekonomi dan pembangunan (Dengan Satuan: Rekomendasi)	2	2	2	2	100%	2	2	100%
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Nilai Indeks Inovasi Daerah (Dengan Satuan: Angka)	62	58,98	60,01	62,22	104%	62	62	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda dalam Renstra

Pada periode Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2018–2023, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis Bappeda yang diukur melalui 4 (empat) indikator sasaran. Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Bappeda Kota Jambi dengan target sebagaimana dimuat dalam Renstra Bappeda. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja masing-masing sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja yang disajikan pada Tabel berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan.

Indikator : a. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja

b. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja

Formulasi : Berdasarkan Penilaian MenPAN-RB atas komponen pengukuran kinerja pada evaluasi SAKIP tahun yang bersangkutan

Realisasi :

Tabel 4. Realisasi Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Tahun 2019 - 2022

No	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI									
			2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	21,85	21,85	22,01	22,23	22,3	22,36	22,43	22,84	22,64	-
2	Pengukuran Kinerja	25	15,75	15,75	15,90	16,04	16,00	16,10	16,20	19,28	16,40	-
4	Pelaporan Kinerja	15		9,64		9,76		9,84		10,05		-
5	Evaluasi Internal	10		5,60		5,76		5,91		15,20		-
6	Capaian Kinerja	20		12,18		12,22		12,39		-		-
	Nilai Hasil Evaluasi	100		65,02		66,01		66,60		67,37		-
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	BB	B	BB	B	BB	B	A	-

Catatan : Untuk penilaian 2023 masih dalam tahap evaluasi KemenPAN-RB.

Berdasarkan tabel Capaian Kinerja Penilaian SAKIP Kota Jambi untuk komponen perencanaan dan pengukuran kinerja diatas dapat dilihat bahwa telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kota Jambi 2018-2023 untuk mendukung capaian SAKIP dalam RPJMD Kota Jambi 2018-2023.

Meskipun capaian kinerja untuk komponen tersebut cukup baik setiap tahunnya, namun secara umum implementasi SAKIP Kota Jambi belum dapat mencapai target tingkat akuntabilitas yang telah ditetapkan. Diharapkan capaian kedua komponen tersebut dapat lebih dioptimalkan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembanguna.

Indikator : Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD

Formulasi : Persentase capaian seluruh indikator kinerja sasaran RPJMD dibagi dengan jumlah indikator sasaran yang sudah di rilis dikali 100%.

Realisasi :

Tabel 5. Realisasi realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD
Tahun 2019 - 2022

2019		2020		2021		2022		2023	
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
100%	120,3%	100%	99,45%	100%	97,66%	100%	108,2%	100%	

Catatan : Untuk capaian 2023 baru dapat dilakukan setelah pelaksanaan tahun anggaran berakhir atau pada awal tahun 2024

Hasil Capaian Indikator Sasaran ini adalah 108,17%. berdasarkan hasil pengukuran 16 indikator kinerja Pemerintah Kota Jambi dari 34 indikator Sasaran pada RPJMD, terdapat beberapa Indikator Sasaran belum dirilis yaitu, diantaranya Nilai SAKIP yang belum dikeluarkan oleh Kemenpan–RB, Indeks survey persepsi Korupsi yang belum dikeluarkan oleh Kemenpan–RB dan Indeks Pemberdayaan Gender yang belum dikeluarkan oleh BPS.

.Adapun Indikator Sasaran yang realisasi capaiannya mencapai 100% bahkan lebih adalah : Indeks Pelayanan Publik sebesar 105,38%, Persentase PERDA dan PERWAL yang ditegakkan sebesar 108,69%, Cakupan Layanan Infrastruktur Pekotaan sebesar 100,73%, Indeks Kualitas Air sebesar 106,52%, Indeks Kualitas Udara sebesar 109,08%, Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 111,25%, Persentase peningkatan PAD sebesar 142,77%, Realisasi Investasi sebesar 149,46%, Tingkat Pengangguran Terbuka 106,77%, Angka Harapan Hidup sebesar 100,24%, Harapan Lama Sekolah sebesar 100%, dan Indeks Pembangunan Pemuda sebesar 100,1%.

Sasaran 3: Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah.

Indikator : Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan

Formulasi : *Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti*

Realisasi :

Tabel 6. Realisasi realisasi Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan Tahun 2019 - 2022

2019		2020		2021		2022		2023	
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Catatan : Untuk capaian 2023 baru dapat dilakukan setelah rekomendasi ditindaklanjuti sebagai perumusan kebijakan tahun 2024 atau yang akan datang

Selanjutnya, dapat juga disampaikan capaian kinerja dalam rangka meningkatkan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Bappeda Kota Jambi sebagai berikut :

a. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Bappeda Kota Jambi

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Bappeda Kota Jambi, bahwa Capaian Nilai PMPRB Bappeda Kota Jambi mendapat nilai (A) 85,44 pada tahun 2021 dengan predikat interpretasi pelayanan “Memuaskan”.. Sedangkan untuk penilaian Tahun 2022 dan 2023 masih dalam proses evaluasi oleh Inspektorat Kota Jambi.

Tabel 7. Realisasi realisasi Capaian Nilia PMPRB Bappeda Kota Jambi Tahun 2019 – 2022

Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
70-71 BB	69,66 B	71-72 BB	85,44 A	72-73 BB	Masih proses evaluasi	80-81 A	Masih proses evaluasi

b. Capaian Nilai SAKIP Bappeda Kota Jambi

Penilaian implementasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja Bappeda Kota Jambi beberapa tahun lalu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Jambi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 8. Progres Nilai SAKIP Bappeda Kota Jambi

Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
79-80 A	79,64 BB	80-81 A	80,43 A	80-81 A	Masih proses evaluasi	80-81 A	Masih proses evaluasi

Dapat dilihat bahwa capaian Nilai SAKIP Bappeda Kota Jambi mendapat nilai (A) 80,34 pada tahun 2021 dengan predikat “Memuaskan”, yang menggambarkan bahwa pengukuran kinerja Bappeda Kota Jambi telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator sehingga dapat mewujudkan kinerja yang berorientasi hasil. Sedangkan untuk penilaian Tahun 2022 dan 2023 masih dalam proses evaluasi oleh Inspektorat Kota Jambi.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Jambi tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappeda, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Isu utama adalah adanya potensi resesi global yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan pelayanan dan pencapaian target kinerja. Sedangkan isu internal yaitu masih rendahnya kualitas perencanaan sehingga perlu ditingkatkan. Hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kota Jambi sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

2.3.1. Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi. Menurut Peraturan Walikota Jambi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi, mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan dan program penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan program penelitian dan pengembangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah dan program penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi difokuskan pada pelayanan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah yang dapat meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Beberapa permasalahan dan hambatan Bappeda Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a) Masih diperlukannya sinergitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik.
- b) Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah harus terus dioptimalkan untuk meminimalisasi deviasi. Diperlukan berbagai inovasi dan strategi mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan

percepatan pencapaian indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan pada awal periode perencanaan;

- c) Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada PD. Tingkat kapasitas pemahaman terkait proses dan substansi perencanaan di setiap level pada OPD masih belum optimal;
- d) Masih di perlukannya penguatan data untuk mendukung proses perencanaan, meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik;

Selain permasalahan tersebut, sebagai sebuah institusi yang menjalankan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh perangkat daerah dalam jajaran Pemerintahan Kota Jambi, terutama dalam hal koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, sangat dibutuhkan tenaga perencana (*planner*) yang mampu menganalisa berbagai faktor pembangunan daerah guna terwujudnya sistem perencanaan pembangunan yang baru yang bersifat menyeluruh, terpadu, sistematis dan tanggap terhadap perubahan zaman serta pelaksanaan pembangunan secara serasi, terpadu dan sinergi.

Untuk menjalankan fungsi Koordinasi tersebut, sangat dibutuhkan tenaga perencana (*planner*) yang mampu menganalisa berbagai faktor pembangunan daerah guna terwujudnya sistem perencanaan pembangunan yang baru yang bersifat menyeluruh, terpadu, sistematis dan tanggap terhadap perubahan zaman serta pelaksanaan pembangunan secara serasi, terpadu dan sinergi.

Adapun permasalahan lainnya pada sumberdaya aparatur yang ada tersebut, antara lain :

- a. Dengan adanya penyetaran jabatan dari Eselon IV menjadi Fungsional Perencana, dimana dari 13 orang Eselon IV beralih menjadi JFT Perencana saat ini tinggal 10 orang, karena 3 orang lainnya dipromosikan dalam Jabatan Administrator (Kabid).

- b. Seluruh JFT Perencana tersebut tidak mempunyai basic pendidikan perencanaan dan belum pernah mengikuti diklat perencanaan.
- c. Seyogyanya setiap bidang setidaknya memiliki 2 atau 3 orang PNS staf teknis. Kondisi saat ini, hanya dibantu oleh TKK untuk pelaksanaan tugas koordinasi dengan mitra kerja perangkat daerah. Sedangkan PNS staf/fungsional umum saat ini hanya terkonsentrasi pada pekerjaan pengelola keuangan kegiatan saja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ANJAB-ABK).

Sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang telah menyusun sampai dengan tahun 2028, setidaknya jumlah pegawai BAPPEDA Kota Jambi berjumlah 119 orang, maka telah disampaikan usulan formasi kebutuhan PNS kepada Walikota Jambi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi.

Maka dari itu, sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan melalui kebijakan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam rangka memperkuat kapasitas perencanaan pembanguna dan pengembangan daerah antara lain:

1. Meningkatkan SDM Perencanaan melalui Diklat Teknis ataupun Bimbingan Teknis Perencanaan,
2. Memperkuat Koordinasi dengan lembaga pemerintahan dan stakeholder,
3. Meningkatkan peran serta perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan kreatifitas / inovasi

2.3.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis dilingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya pemahaman tentang perencanaan bagi Perangkat Daerah.
- b) Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah.
- c) Peningkatan pembinaan disiplin kerja yang berkelanjutan.
- d) Komitmen perencanaan dengan OPD.
- e) Dinamika masyarakat yang semakin kompleks.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- a) Adanya Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda Kota Jambi.
- b) Adanya dokumen RPJP, RPD dan RKPD.
- c) Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang.
- d) Adanya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

- e) Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.
- f) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi perencanaan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
- g) Adanya peningkatan kerjasama antar lembaga perencanaan baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan.
- h) Adanya peningkatan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas.
- i) Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
- j) Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh perangkat daerah. Review ini dapat dilihat pada Table.9 (T-C.31) berikut ini:

Tabel.9 (T-C.31) Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 Kota Jambi

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024				
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							13.249.670.000	
	A. URUSAN PERENCANAAN				11.059.768.831	A. URUSAN PERENCANAAN			12.564.670.000
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP BAPPEDA (Dengan Satuan:Nilai)	A	8.486.026.344	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP BAPPEDA (Dengan Satuan:Nilai)	A	10.230.670.000	
1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan (Dengan Satuan: Persen)</i>	100%	431.898.498	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan (Dengan Satuan: Persen)</i>	100%	437.000.000	
1	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)</i>	6	74.805.466	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)</i>	6	77.000.000	
2	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan: Laporan)</i>	3	357.093.032	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan: Laporan)</i>	3	360.000.000	
2	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Tertib Administrasi Keuangan (Dengan Satuan: Persen)</i>	100%	5.271.168.348	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Tertib Administrasi Keuangan (Dengan Satuan: Persen)</i>	100%	6.651.485.000	
1	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: org/bln)</i>	37	4.815.592.425	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: org/bln)</i>	57	6.241.485.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	12	360.452.847	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	8	360.000.000
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	3	22.193.018	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	2	50.000.000
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan /Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	4	24.994.838	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan /Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	-	-
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	47.935.220	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	50.000.000
1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	1	47.935.220	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	1	50.000.000
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan: Persen)	100%	298.275.960	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan: Persen)	100%	420.000.000
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan (Dengan Satuan: Paket)	3	58.275.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan (Dengan Satuan: Paket)	3	110.000.000
2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan: Dokumen)	3	115.000.960	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan: Dokumen)	3	115.000.000

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
3	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti diklat (Dengan Satuan: Orang)	20	62.500.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti diklat (Dengan Satuan: Orang)	20	62.500.000
4	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Peraturan PerUU (Dengan Satuan: Orang)	20	62.500.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Peraturan PerUU (Dengan Satuan: Orang)	20	132.500.000
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum (Dengan Satuan: Persen)	100%	1.188.290.458	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum (Dengan Satuan: Persen)	100%	1.195.000.000
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	77.603.064	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	78.000.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	5	214.862.700	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	5	215.000.000
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	6	228.787.663	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	6	229.000.000
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	49.067.051	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	50.000.000
5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Dengan Satuan: Laporan)	1	42.723.900	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Dengan Satuan: Laporan)	1	43.000.000

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	1	530.970.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	1	535.000.000
7	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	1	44.276.080	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	1	45.000.000
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	150.000.000
1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	12	150.000.000
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	551.292.860	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	629.000.000
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan: Laporan)	1	26.040.460	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan: Laporan)	1	27.000.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dengan Satuan: Laporan)	1	265.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dengan Satuan: Laporan)	1	340.000.000
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dengan Satuan: Laporan)	1	100.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dengan Satuan: Laporan)	1	100.000.000

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dengan Satuan: Laporan)	1	160.252.400	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dengan Satuan: Laporan)	1	162.000.000
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	697.165.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	698.185.000
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Dengan Satuan: Unit)	22	331.735.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Dengan Satuan: Unit)	22	331.735.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Dengan Satuan: Unit)	8	69.020.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Dengan Satuan: Unit)	8	70.000.000
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan: Unit)	75	84.960.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan: Unit)	75	85.000.000
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan: Unit)	3	60.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan: Unit)	3	60.000.000
5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/diherabilitasi (Dengan Satuan: Unit)	3	106.500.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/diherabilitasi (Dengan Satuan: Unit)	3	106.500.000

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
6	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ diherabilitasi (Dengan Satuan: Unit)</i>	33	44.950.000	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ diherabilitasi (Dengan Satuan: Unit)</i>	33	44.950.000
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (Dengan Satuan: Persen)	100%	1.382.868.159	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (Dengan Satuan: Persen)	100%	1.122.000.000
9	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (Dengan Satuan: Dokumen)	6	887.859.813	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (Dengan Satuan: Dokumen)	6	692.000.000
1	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Berita Acara)</i>	1	379.896.557	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Berita Acara)</i>	1	302.000.000
2	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)</i>	6	507.963.256	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)</i>	6	390.000.000
10	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	2	245.020.177	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	2	220.000.000
1	<i>Sub Kegiatan Analisis dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Dengan Satuan: Dokumen)</i>	2	195.033.971	<i>Sub Kegiatan Analisis dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Dengan Satuan: Dokumen)</i>	2	220.000.000

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
2	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Dengan Satuan: Dokumen)	1	49.986.206	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Dengan Satuan: Dokumen)	-	-
11	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Dengan Satuan : Laporan)	4	249.988.169	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Dengan Satuan : Laporan)	4	210.000.000
1	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan: Laporan)</i>	1	30.196.707	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan: Laporan)</i>	1	30.000.000
2	<i>Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Dengan Satuan: Laporan)</i>	3	219.791.462	<i>Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Dengan Satuan: Laporan)</i>	3	180.000.000
III.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH PADA KOMPONEN PERENCANAAN & PENGUKURAN KINERJA (Dengan Satuan: Angka)	26,11 & 17,93	1.190.874.328	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH PADA KOMPONEN PERENCANAAN & PENGUKURAN KINERJA (Dengan Satuan: Angka)	26,11 & 17,93	1.212.000.000
12	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan: Angka)	26,82 & 18,64	599.999.869	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan: Angka)	26,82 & 18,64	621.125.000

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	2	105.485.131	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	2	121.125.000
2	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	4	494.514.738	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	4	500.000.000
13	Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA (Dengan Satuan: Angka)	26,99 & 18,32	220.874.459	Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA (Dengan Satuan: Angka)	26,99 & 18,32	220.875.000
1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	2	95.874.459	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	2	95.875.000
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Dengan Satuan: Perangkat Daerah)	6	25.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Dengan Satuan: Perangkat Daerah)	6	25.000.000

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	2	75.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	2	75.000.000
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Dengan Satuan: Perangkat Daerah)	2	25.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Dengan Satuan: Perangkat Daerah)	2	25.000.000
14	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan: Angka)	24,52 & 16,82	370.000.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan: Angka)	24,52 & 16,82	370.000.000
1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	2	220.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	2	220.000.000
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Dengan Satuan: Perangkat Daerah)	5	150.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Dengan Satuan: Perangkat Daerah)	5	150.000.000

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
	B. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			692.166.389	B. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			685.000.000
IV.	PROGRAM PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KAJIAN YANG DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN (Dengan Satuan: Persen)	100%	692.166.389	PROGRAM PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KAJIAN YANG DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN (Dengan Satuan: Persen)	100%	685.000.000
15	<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	Rekomendasi hasil kajian bidang bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan (Dengan Satuan: Dokumen)	2	192.430.226	<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	Rekomendasi hasil kajian bidang bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan (Dengan Satuan: Dokumen)	2	175.000.000
1	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan: Laporan)</i>	2	139.430.327	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan: Laporan)</i>	2	175.000.000
	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi</i>	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2	52.999.899	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi</i>	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	-	-
16	<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	Rekomendasi hasil kajian bidang sosial budaya dan kependudukan (Dengan Satuan: Rekomendasi)	2	99.381.181	<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	Rekomendasi hasil kajian bidang sosial budaya dan kependudukan (Dengan Satuan: Rekomendasi)	2	105.000.000
1	<i>Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan</i>	2	99.381.181	<i>Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan</i>	2	105.000.000

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024			
	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif
	<i>Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>	<i>Perempuan dan Perlindungan Anak (Dengan Satuan: Dokumen)</i>			<i>Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>	<i>Perlindungan Anak (Dengan Satuan: Dokumen)</i>		
17	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rekomendasi hasil kajian bidang ekonomi dan pembangunan (Dengan Satuan: Rekomendasi)	2	49.999.707	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rekomendasi hasil kajian bidang ekonomi dan pembangunan (Dengan Satuan: Rekomendasi)	2	120.000.000
1	<i>Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dengan Satuan: Dokumen)</i>	<i>1</i>	<i>49.999.707</i>	<i>Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dengan Satuan: Dokumen)</i>	<i>1</i>	<i>60.000.000</i>
2	<i>Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dengan Satuan: Dokumen)</i>	<i>1</i>		<i>Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dengan Satuan: Dokumen)</i>	<i>1</i>	<i>60.000.000</i>
18	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Nilai Indeks Inovasi Daerah (Dengan Satuan: Angka)	62,75	350.355.275	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Nilai Indeks Inovasi Daerah (Dengan Satuan: Angka)	62,75	285.000.000
1	<i>Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dengan Satuan: Dokumen)</i>	<i>1</i>	<i>110.741.907</i>	<i>Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dengan Satuan: Dokumen)</i>	<i>1</i>	<i>120.000.000</i>
2	<i>Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Dengan Satuan: Laporan)</i>	<i>1</i>	<i>239.613.368</i>	<i>Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Dengan Satuan: Laporan)</i>	<i>1</i>	<i>165.000.000</i>

Dari hasil review yang disajikan dalam Tabel.9 (T-C.31) diatas, terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan terhadap Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Jambi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. terdapat perubahan anggaran antara Rancangan Awal RKPD 2024 dengan analisis hasil kebutuhan, dimana terdapat penambahan jumlah anggaran sebesar Rp 1.744.643.656, antara lain disebabkan oleh :
 - a. Penyesuaian/Kenaikan Gaji PNS 8% sesuai dengan Pidato Kenegaraan Presiden RI tanggal 16 Agustus 2023.
 - b. Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana.
 - c. Mengantisipasi diterimanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk Bappeda Kota Jambi sesuai sehingga dialokasikan untuk Gaji.
2. Adanya penyesuaian indikator terutama pada sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi sebagai unsur perencanaan pembangunan daerah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, sampai ke Musrenbang Kota, maupun dalam pembahasan yang didiskusikan pada Forum Perangkat Daerah Bappeda, tidak ada usulan

program/kegiatan baik dari kelompok masyarakat, DPRD Kota Jambi, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, *stakeholder*, maupun perangkat daerah lainnya yang ditujukan untuk dimasukkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Jambi Tahun 2024. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasa bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional , Provinsi dan Daerah

3.1.1 Telaahan Terhadap Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan Pembangunan Nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional. Visi tersebut adalah “*Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”, yang dilakukan melalui 9 Misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, bahwa Visi Bappenas yaitu “Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024, yaitu:

Misi 1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Tujuan-1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Tujuan-2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi 2 : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Tujuan-3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mendukung pelaksanaan Misi ke-1 yaitu Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa, melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat. Kedua tujuan pada Misi ke-1 Kementerian PPN/Bappenas pada yang terkait dengan Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian PPN/Bappenas adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan

daerah;

- c. Menguatnya peran Walikota sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Arah kebijakan yang telah ditetapkan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah adalah meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui strategi:

- a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
- b. Mendorong harmonisasi, keselarasan dan sinergitas pembangunan antar Daerah serta antara pusat dan daerah;
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Terhadap tujuan dan sasaran Kementerian PPN/Bappenas telah memberikan arahan bahwa institusi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus pula dapat mewujudkan setiap perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil untuk mempercepat kemajuan daerah dan daya tanggap serta inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien Terhadap arah kebijakan dan strategi terdapat arahan kerja nasional yang sesuai dengan agenda Nawacita, dapat menjadi masukan untuk peningkatan kinerja Bappeda di daerah antara lain:

1. pentingnya untuk melaksanakan penguatan kelembagaan
2. koordinasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja;
3. penyusunan rencana pembangunan di bidang aparatur dan masyarakat.

Berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas hasil evaluasi yang menjadi arah kebijakan nasional terdapat hal yang perlu di garis bawahi bahwa evaluasi tidak hanya harus dilaksanakan pada tingkat kebijakan akan tetapi juga pada tingkat kajian-kajian perencanaan.

Peningkatan kualitas data dan informasi serta reformasi birokrasi. Terhadap strategi yang diarahkan Kementerian PPN/Bappenas yang juga harus dilaksanakan oleh daerah adalah bahwa strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan dan koordinasi perencanaan pembangunan yang berkualitas harus mencakup berbagai pembangunan dari segi internal maupun eksternal

institusi perencanaan, sebagaimana strategi institusi perencanaan nasional, yang tentunya disesuaikan dengan potensi, masalah, peluang dan tantangan di tingkat daerah.

3.1.2. Telaahan Terhadap Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021–2026 adalah “Memantapkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif, Berdampak dan Inovatif “ dengan indikator tujuannya adalah Indeks Reformasi Birokrasi Bidang Perencanaan.

Terdapat 2 (dua) Sasaran Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021–2026 yaitu :

1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Integratif dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi.

Indikator Sasarannya adalah :

- a) Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD;
- b) Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD;
- c) Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJMD;
- d) Persentase Konsistensi Program RPJMD dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e) Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana tahun sebelumnya;
- f) Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral dengan Rencana Spasial;
- g) Persentase Keterisian Data dan Rencana dalam Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Strategi Bappeda Provinsi Jambi 2021-2026 untuk mewujudkan sasaran ini adalah meningkatkan keselarasan dan keterpaduan dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan berbasis sistim informasi dan teknologi. Dengan arah kebijakan yaitu :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah pembangunan daerah
 - 2) Fasilitasi Renstra dan Renja penyusunan Perangkat Daerah
 - 3) Peningkatan fasilitasi keselarasan dokumen perencanaan Pembangunan daerah
 - 4) Perencanaan pembangunan mengacu tata ruang kewilayahan (spasial)
 - 5) Fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan, pembangunan daerah
 - 6) Peningkatan pengolahan data dan informasi pembangunan daerah
 - 7) Peningkatan kualitas perencanaan kinerja
 - 8) Peningkatan kualitas pengukuran kinerja
 - 9) Peningkatan integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kapasitas Instansi Bappeda Provinsi Jambi. Indikator Sasarannya adalah :
- a) Predikat AKIP Perangkat Daerah;
 - b) Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dipublikasikan dan Tepat Waktu;
 - c) Persentase Peningkatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah.

Strategi Bappeda Provinsi Jambi 2021-2026 untuk mewujudkan sasaran ini adalah Optimalisasi tata kelola Perangkat Daerah Bappeda terukur dan tepat waktu; dan Optimalisasi SDM untuk meningkatkan standar mutu aparatur perencana. Dengan arah kebijakan yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas evaluasi capaian kinerja Perangkat daerah
- 2) Penerapan Sistem Tata Kelola Perangkat Daerah akuntabel dan tepat waktu
- 3) Peningkatan Kapabilitas dan Kompetensi Aparatur Perencana Bappeda
- 4) Mendorong Fungsional Umum untuk menjadi fungsional Perencana atau fungsional tertentu.

Tentunya, keberhasilan pembangunan secara makro Kota Jambi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi tetapi juga ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada

Provinsi Jambi. Untuk itu, prinsip KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi) dalam dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah, perlu dioptimalkan.

3.1.3. Telaahan Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2024

Dokumen perencanaan pembangunan Kota Jambi yang dipedomani dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2024 adalah Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 tahun 2023 tentang Rencana Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2024, yang merupakan dokumen transisi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pentusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Bari.

Pembangunan Kota Jambi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Jambi yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional. Tema pembangunan Kota Jambi pada tahun perencanaan 2024 adalah “Penguatan Stabilitas Ekonomi, Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Daerah, Infrastruktur yang handal serta Lingkungan Hidup Berkelanjutan”.

Dikaitkan dengan visi Pembangunan Kota Jambi dalam RPD 2024 – 2026 yaitu “Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya dengan Mengedepankan Pelayanan Prima”, melalui 5 (lima) Misi pembangunan yakni Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi; Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat; Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan; Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan; dan, Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan, maka, sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung-jawab dalam pengkoordinasian proses perencanaan pembangunan, Bappeda turut bertanggung-jawab dalam mewujudkan kelima misi

pembangunan tersebut, yakni menyelenggarakan penguatan perencanaan pembangunan pada perangkat daerah yang berkualitas, sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil, selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan nasional.

Disamping itu, eksistensi Bappeda juga sebagai salah satu perangkat daerah yang berkontribusi untuk mendukung pencapaian dari Misi pertama, yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi 1 Pembangunan Kota Jambi tersebut, tujuan yang dirumuskan dalam Renstra Bappeda Kota Jambi Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan”, dengan indikator tujuannya adalah Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan sebesar 85 dengan kategori “Sangat Baik”.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka sasaran kinerja yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan organisasi adalah :

1. Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan, dengan indikator sasaran kinerja yaitu Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja 22,92 dan Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja 17,91;
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan, dengan indikator kinerja yaitu Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD; dan
3. Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang Dalam Pembangunan Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan.

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi mengemban 2 (dua) urusan penunjang yaitu Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka program dan kegiatan pada Bappeda Kota Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Perangkat Daerah, dengan target capaian nilai 81;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator program adalah kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah, dengan target capaian 100%,
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator program adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Komponen Perencanaan, dengan target 26,11, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Komponen Pengukuran Kinerja, dengan target 17,93; dan
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator program adalah Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan, dengan target capaian 100%.

3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bappeda Kota Jambi melaksanakan 2 (dua) urusan, yaitu Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan. Pada tahun 2024, Bappeda Kota Jambi direncanakan akan melaksanakan 4 (empat) program dengan 18 (delapan belas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.249.670.000,-. Adapun rekapitulasi program dan kegiatan beserta kebutuhan dana Bappeda Kota Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. URUSAN PERENCANAAN	12.564.670.000
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.230.670.000
1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	437.000.000
2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.651.485.000
3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000
4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	420.000.000
5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.195.000.000
6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000
7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	629.000.000
8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	698.185.000
II PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.122.000.000
9 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	692.000.000
10 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	220.000.000
11 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	210.000.000
III PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.212.000.000
12 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	621.125.000
13 Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	220.875.000
14 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	370.000.000
B. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	685.000.000
IV PROGRAM PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	685.000.000
15 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	175.000.000
16 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	105.000.000
17 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	120.000.000
18 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	285.000.000

Secara rinci rencana program dan kegiatan serta pagu anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai mana Tabel.10 (T-C.33) berikut :

Tabel.10 (T-C.33). Rumusan Rencana Program-Kegiatan Bappeda Kota Jambi Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Kinerja	Jumlah Dana	Lokasi	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
A. URUSAN PERENCANAAN				12.564.670.000				13.180.790.000	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP BAPPEDA (Dengan Satuan Nilai)	A	10.230.670.000	Bappeda Kota Jambi	PAD & DAU	A	10.659.790.000	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan (Dengan Satuan: Persen)	100%	437.000.000		PAD	100%	467.000.000	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	6	77.000.000	Bappeda Kota Jambi	PAD	6	82.000.000	
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	3	360.000.000		PAD	3	386.000.000	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan (Dengan Satuan: Persen)	100%	6.651.485.000		PAD & DAU	100%	6.980.790.000	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: org/bth)	57	6.241.485.000		DAU	57	6.540.040.000	
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	8	360.000.000	Bappeda Kota Jambi	PAD	8	386.760.000	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	2	50.000.000		PAD	2	55.000.000	
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dengan Satuan: Laporan)		0		PAD		0	
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	50.000.000	Bappeda Kota Jambi	PAD	100%	49.000.000	
1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	1	50.000.000		PAD	1	49.000.000	
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan: Persen)	100%	420.000.000		PAD	100%	422.000.000	
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta atribut kelengkapan (Dengan Satuan: Paket)	3	110.000.000		PAD	3	110.000.000	
2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Laporan Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan: Dokumen)	3	116.000.000	Bappeda Kota Jambi	PAD	3	116.000.000	
3	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti diklat (Dengan Satuan: Orang)	20	62.500.000		PAD	20	63.000.000	
4	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Peratran PerUU (Dengan Satuan: Orang)	20	132.500.000		PAD	20	133.000.000	
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum (Dengan Satuan: Persen)	100%	1.195.000.000		PAD	100%	1.195.000.000	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	78.000.000		PAD	1	78.000.000	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	5	215.000.000		PAD	5	215.000.000	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	6	229.000.000	Bappeda Kota Jambi	PAD	6	229.000.000	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	50.000.000		PAD	1	50.000.000	
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dengan Satuan: Dokumen)		-		PAD		-	
6	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Dengan Satuan: Laporan)	1	43.000.000		PAD	1	43.000.000	
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	1	535.000.000		PAD	1	535.000.000	
8	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	1	45.000.000		PAD	1	45.000.000	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Kinerja	Jumlah Dana	Lokasi	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	150.000.000				100%	170.000.000
1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	-	-	Bappeda Kota Jambi	PAD		1	315.000.000
2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	12	150.000.000		PAD		14	170.000.000
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	629.000.000				100%	659.000.000
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan: Laporan)	1	27.000.000	Bappeda Kota Jambi	PAD		1	27.000.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dengan Satuan: Laporan)	1	340.000.000		PAD		1	360.000.000
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dengan Satuan: Laporan)	1	100.000.000		PAD		1	110.000.000
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dengan Satuan: Laporan)	1	162.000.000		PAD		1	162.000.000
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	698.185.000				100%	717.000.000
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Dengan Satuan: Unit)	22	331.735.000	Bappeda Kota Jambi	PAD		22	335.000.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Dengan Satuan: Unit)	8	70.000.000		PAD		8	75.000.000
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan: Unit)	75	85.000.000		PAD		75	86.000.000
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan: Unit)	3	60.000.000		PAD		3	65.000.000
5	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Dengan Satuan: Unit)	3	106.500.000		PAD		3	110.000.000
6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Dengan Satuan: Unit)	33	44.950.000		PAD		33	46.000.000
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (Dengan Satuan: Persen)	100%	1.122.000.000	Bappeda Kota Jambi	PAD		100%	1.212.000.000
9	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan Daerah (Target : 100%)	100%	692.000.000				100%	752.000.000
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Benda Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Benda Acara)	1	302.000.000	Bappeda Kota Jambi	PAD		1	402.000.000
2	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD, RPJMD, RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	6	390.000.000		PAD		6	350.000.000
10	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data Pembangunan (Target : 100%)	100%	220.000.000				100%	230.000.000
1	Sub Kegiatan Analisis dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	2	220.000.000	Bappeda Kota Jambi	PAD		2	230.000.000
2	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Dengan Satuan: Dokumen)	1			PAD		1	
11	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Evaluasi Perangkat Daerah (Target : 100%)	100%	210.000.000				100%	230.000.000
1	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan: Laporan)	1	30.000.000	Bappeda Kota Jambi	PAD		1	30.000.000
2	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	3	180.000.000		PAD		3	200.000.000

No	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Kinerja	Jumlah Dana	Lokasi	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
A. URUSAN PERENCANAAN				12.564.670.000				13.180.790.000	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP BAPPEDA (Dengan Satuan:Nilai)	A	10.230.670.000	Bappeda Kota Jambi	PAD & DAU	A	10.659.790.000	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan (Dengan Satuan: Persen)	100%	437.000.000	Bappeda Kota Jambi	PAD	100%	467.000.000	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	6	77.000.000		PAD	6	82.000.000	
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	3	360.000.000	PAD	3	385.000.000		
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan (Dengan Satuan: Persen)	100%	6.651.485.000	Bappeda Kota Jambi	PAD & DAU	100%	6.960.790.000	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: org/bln)	57	6.241.485.000		DAU	57	6.540.040.000	
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	8	360.000.000		PAD	8	385.750.000	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	2	50.000.000		PAD	2	55.000.000	
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan /Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan: Laporan)		0		PAD		0	
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	50.000.000	Bappeda Kota Jambi	PAD	100%	49.000.000	
1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	1	50.000.000		PAD	1	49.000.000	
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan: Persen)	100%	420.000.000	Bappeda Kota Jambi	PAD	100%	422.000.000	
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya (Dengan Satuan: Paket)	3	110.000.000		PAD	3	110.000.000	
2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan: Dokumen)	3	115.000.000		PAD	3	116.000.000	
3	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti diklat (Dengan Satuan: Orang)	20	62.500.000		PAD	20	63.000.000	
4	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek/Peraturan PerUU (Dengan Satuan: Orang)	20	132.500.000		PAD	20	133.000.000	
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum (Dengan Satuan: Persen)	100%	1.195.000.000	Bappeda Kota Jambi	PAD	100%	1.195.000.000	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	78.000.000		PAD	1	78.000.000	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	5	215.000.000		PAD	5	215.000.000	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	6	229.000.000		PAD	6	229.000.000	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	50.000.000		PAD	1	50.000.000	
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dengan Satuan: Dokumen)		-		PAD		-	
6	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan: Laporan)	1	43.000.000		PAD	1	43.000.000	
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	1	535.000.000		PAD	1	535.000.000	
8	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	1	45.000.000		PAD	1	45.000.000	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Kinerja	Jumlah Dana	Lokasi	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
16	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan untuk perumusan kebijakan bidang sosial budaya dan kependudukan (Dengan Satuan: Persent)	2	105.000.000	Bappeda Kota Jambi	PAD		2	105.000.000
1	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dengan Satuan: Dokumen)	2	105.000.000		PAD		2	105.000.000
17	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan untuk perumusan kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan (Dengan Satuan: Persent)	2	120.000.000	Bappeda Kota Jambi	PAD		2	114.000.000
1	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi/ Usaha Kecil dan Menengah (Dengan Satuan: Dokumen)	1	60.000.000		PAD		1	57.000.000
2	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Dengan Satuan: Dokumen)	1	60.000.000		PAD		1	57.000.000
18	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Nilai Indeks Inovasi Daerah (Dengan Satuan: Angka)	62,75	285.000.000	Bappeda Kota Jambi	PAD		63,00	335.000.000
1	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dengan Satuan: Dokumen)	1	120.000.000		PAD		1	120.000.000
2	Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Dengan Satuan: Laporan)	1	165.000.000		PAD		1	215.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan berbagai isu-isu penting yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi, dalam menopang misi pemerintah daerah yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi dengan Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK dengan indikator sasaran meningkatnya nilai SAKIP.

Untuk Tahun 2024, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kota Jambi Tahun 2024

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (<i>out comes</i>) / Kegiatan (<i>out put</i>)	Rencana Tahun 2024	
			Target Kinerja	Jumlah Dana
	A. URUSAN PERENCANAAN			12.564.670.000
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP BAPPEDA (Dengan Satuan:Nilai)	A	10.230.670.000
1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan (Dengan Satuan: Persen)	100%	437.000.000
2	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tertib Administrasi Keuangan (Dengan Satuan: Persen)	100%	6.651.485.000
3	<i>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	50.000.000
4	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Tertib Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan: Persen)	100%	420.000.000
5	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Tertib Administrasi Umum (Dengan Satuan: Persen)	100%	1.195.000.000
6	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	150.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (<i>out comes</i>) / Kegiatan (<i>out put</i>)	Rencana Tahun 2024	
			Target Kinerja	Jumlah Dana
7	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	629.000.000
8	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	698.185.000
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (Dengan Satuan: Persen)	100%	1.122.000.000
9	<i>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100%	692.000.000
10	<i>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Persentase ketersediaan data Pembangunan (Dengan Satuan : Persen)	100%	220.000.000
11	<i>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Evaluasi Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Persen)	100%	210.000.000
III.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH PADA KOMPONEN PERENCANAAN & PENGUKURAN KINERJA (Dengan Satuan: Angka)	26,11 & 17,93	1.212.000.000
12	<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan: Angka)	26,82 & 18,64	621.125.000
13	<i>Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA (Dengan Satuan: Angka)	26,99 & 18,32	220.875.000
14	<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan: Angka)	24,52 & 16,82	370.000.000
B. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				685.000.000
IV.	PROGRAM PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KAJIAN YANG DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN (Dengan Satuan: Persen)	100%	685.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (<i>out comes</i>) / Kegiatan (<i>out put</i>)	Rencana Tahun 2024	
			Target Kinerja	Jumlah Dana
15	<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan untuk perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan (Dengan Satuan: Persen)	100%	175.000.000
16	<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan untuk perumusan kebijakan bidang sosial budaya dan kependudukan (Dengan Satuan: Persen)	100%	105.000.000
17	<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan untuk perumusan kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan (Dengan Satuan: Persen)	100%	120.000.000
18	<i>Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	Nilai Indeks Inovasi Daerah (Dengan Satuan: Angka)	62,75	285.000.000

BAB V

PENUTUP

Penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Kota Jambi merupakan penerjemahan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Disamping itu juga untuk sinergitas dalam perencanaan juga mengakomodir dan berpedoman pada berbagai dokumen perencanaan lainnya disamping Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah memiliki peran penting dalam memberikan bahan masukan penyusunan RKPD, dimana memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) melalui Forum Perangkat Daerah dan FGD serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) guna menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan. Melalui pendekatan teknokratis dan partisipatif, *bottom up/top down*, program dan kegiatan disusun guna menjamin perbaikan berkesinambungan (*continues improvement*).

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026 dan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Jambi 2024-2026.

Dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024 didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian indikator RPJMD sampai dengan Tahun 2023 serta pencapaian indikator kinerja Bappeda. Dokumen ini juga memuat perumusan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya untuk anggaran Tahun 2024, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Jambi. Dokumen ini selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.

Apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan dibuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan

mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Mengingat dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024 maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Bappeda Kota Jambi secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berada dalam lingkup Bappeda Kota Jambi berkewajiban menjamin konsistensi penyusunan RKA Tahun 2024 dengan berpedoman pada Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024.
3. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan, pengendalian dan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.
4. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 ini juga digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan indikator dan target kinerja.

Jambi, Agustus 2023
KEPALA BAPPEDA KOTA JAMBI



SUHENDRI, SH,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700404 199601 1 002

POHON KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024

Sasaran RPD	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK Nilai SAKIP Target 2024 : BB																	Kepala Daerah	
Tujuan Renstra BAPPEDA	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan (IKPP) Target 2024 : 81,27																		
Sasaran Renstra BAPPEDA	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan			Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan				Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah				Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Bappeda						Kepala BAPPEDA	
	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja Target 2024 : 22,92		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja Target 2024 : 17,91		Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD Target 2024 : 100%				Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan Target 2024 : 100%				INDEKS REFORMASI BIROKRASI BAPPEDA 2024 : 87						
Kinerja Program	Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Target 2024 : 26,11 & 17,93			Mewujudkan kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah Target 2024 : 100%				Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti untuk perumusan kebijakan Target 2024 : 100%				Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Bappeda Target 2024 : A							
Kinerja Kegiatan	Meningkatkan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan : Angka) Tgt.2024 : 26,82 & 18,64	Meningkatkan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (Dengan Satuan : Angka) Tgt.2024 : 26,99 & 18,32	Meningkatkan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan : Angka) Tgt.2024 : 24,52 & 16,82	Melaksanakan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang tepat Waktu (Dengan Satuan : Persen) Tgt.2024 : 100%	Meningkatkan ketersediaan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan : Persen) Tgt.2024 : 100%	Melaksanakan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat Waktu (Dengan Satuan : Persen) Tgt.2024 : 100%	Meningkatkan persentase pemanfaatan rekomendasi hasil kajian untuk perumusan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (Dengan Satuan : Persen) Tgt.2024 : 100%	Meningkatkan persentase pemanfaatan rekomendasi hasil kajian untuk perumusan kebijakan Bidang Sosial dan Kependudukan (Dengan Satuan : Persen) Tgt.2024 : 100%	Meningkatkan Nilai Indeks Inovasi Daerah (Dengan Satuan : Nilai Angka) Tgt.2024 : 62,75	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan Target 2024 : 100%	Persentase Tertib Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Target 2024 : 100%	Persentase Tertib Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Target 2024 : 100%	Persentase Tertib Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah Target 2024 : 100%	Persentase Tertib Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Target 2024 : 100%	Persentase Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Target 2024 : 100%	Persentase Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Target 2024 : 100%	Persentase Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah Target 2024 : 100%	Eselon III BAPPEDA	
Kinerja Sub Kegiatan	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan : Dokumen) Tgt.2024 : 2 Terkoordinirnya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan : Dokumen) Tgt.2024 : 4 Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan : Dokumen) Tgt.2024 : 2 Terlaksanakannya monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja pada Perangkat Daerah Bidang SDA (Dengan Satuan: Perangkat Daerah) Tgt.2024 : 2	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan : Dokumen) Tgt.2024 : 2 Terlaksanakannya monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja pada Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Perangkat Daerah) Tgt.2024 : 6 Terlaksanakannya monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja pada Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Perangkat Daerah) Tgt.2024 : 2	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan : Dokumen) Tgt.2024 : 2 Terlaksanakannya monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja pada Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Perangkat Daerah) Tgt.2024 : 5	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota (Dengan Satuan : Berita Acara) (Dengan Satuan : Dokumen) Tgt.2024 : 1 Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dengan Satuan : Dokumen) Tgt.2024 : 6	Terpenuhinya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Dengan Satuan : Dokumen) Tgt.2024 : 1 Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan : Dokumen) Tgt.2024 : 1	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota (Dengan Satuan : Laporan) Tgt.2024 : 1 Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dengan Satuan : Laporan) Tgt.2024 : 3	Terlaksananya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan : Laporan) Tgt.2024 : 1 Terkelolanya Data Keitbangan dan Peraturan dengan baik (Dengan Satuan : Laporan) Tgt.2024 : 1	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial (Dengan Satuan : Dokumen) Tgt.2024 : 2 Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dengan Satuan : Dokumen) Tgt.2024 : 1	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dengan Satuan : Dokumen) Tgt.2024 : 1 Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dengan Satuan : Dokumen) Tgt.2024 : 1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Dokumen) Tgt.2024 : 6 Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan : Laporan) Tgt.2024 : 3	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: org/bn) (Dengan Satuan : Dokumen) Tgt.2024 : 57 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan: Dokumen) Tgt.2024 : 8 Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dengan Satuan: Laporan) Tgt.2024 : 0	Terlaksananya penyusunan Dokumen Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan: Dokumen) Tgt.2024 : 1 Terlaksananya penyusunan Laporan Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan: Dokumen) Tgt.2024 : 3 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dengan Satuan: Dokumen) Tgt.2024 : 2 Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dengan Satuan: Laporan) Tgt.2024 : 0	Terlaksananya penyediaan Pakai Dinas beserta atribut kelengkapan (Dengan Satuan: Paket) Tgt.2024 : 3 Terlaksananya penyusunan Laporan Dokumen Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan: Dokumen) Tgt.2024 : 3 Terlaksananya penyediaan Pakai Dinas beserta atribut kelengkapan (Dengan Satuan: Paket) Tgt.2024 : 20 Terlaksananya penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dengan Satuan: Orang) Tgt.2024 : 20 Terlaksananya penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dengan Satuan: Paket) Tgt.2024 : 0 Terlaksananya Penyusunan Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Dengan Satuan: Laporan) Tgt.2024 : 1 Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan) Tgt.2024 : 1 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan: Dokumen) Tgt.2024 : 1	Terlaksananya penyediaan Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan (Dengan Satuan: Unit) Tgt.2024 : 0 Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dengan Satuan: Unit) Tgt.2024 : 5 Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dengan Satuan: Unit) Tgt.2024 : 12 Terlaksananya penyediaan Jasa Perawatan dan Perlempangan Kantor (Dengan Satuan: Paket) Tgt.2024 : 6 Terlaksananya penyediaan Pengadaan (Dengan Satuan: Paket) Tgt.2024 : 1 Terlaksananya penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dengan Satuan: Paket) Tgt.2024 : 1 Terlaksananya penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dengan Satuan: Paket) Tgt.2024 : 0 Terlaksananya Penyusunan Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Dengan Satuan: Laporan) Tgt.2024 : 1 Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan) Tgt.2024 : 1 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan: Dokumen) Tgt.2024 : 1	Terlaksananya penyediaan Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan (Dengan Satuan: Unit) Tgt.2024 : 0 Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dengan Satuan: Unit) Tgt.2024 : 12 Terlaksananya penyediaan Jasa Perawatan dan Perlempangan Kantor (Dengan Satuan: Paket) Tgt.2024 : 6 Terlaksananya penyediaan Pengadaan (Dengan Satuan: Paket) Tgt.2024 : 1 Terlaksananya penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dengan Satuan: Paket) Tgt.2024 : 1 Terlaksananya penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dengan Satuan: Paket) Tgt.2024 : 0 Terlaksananya Penyusunan Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Dengan Satuan: Laporan) Tgt.2024 : 1 Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan) Tgt.2024 : 1 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan: Dokumen) Tgt.2024 : 1	Terlaksananya penyusunan Laporan Surat Menyurat (Dengan Satuan: Laporan) Tgt.2024 : 1 Terlaksananya penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dengan Satuan: Laporan) Tgt.2024 : 1 Terlaksananya penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlempangan Kantor (Dengan Satuan: Paket) Tgt.2024 : 75 Terlaksananya penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dengan Satuan: Laporan) Tgt.2024 : 1 Terlaksananya penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlempangan Kantor (Dengan Satuan: Paket) Tgt.2024 : 3 Terlaksananya penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlempangan Kantor (Dengan Satuan: Paket) Tgt.2024 : 3 Terlaksananya penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlempangan Kantor (Dengan Satuan: Paket) Tgt.2024 : 33	Eselon IV / JFT BAPPEDA		

CASCADING KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024

Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK																Sasaran RPJMD		
Nilai SAKIP Kota Jambi																		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan																Tujuan Renstra BAPPEDA		
Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan (IKPP)																		
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan			Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah			Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Bappeda								Sasaran Renstra BAPPEDA		
Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD			Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan			Indeks Reformasi Birokrasi Bappeda										
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Penelitian dan Pengembangan Daerah			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								Program		
Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah		Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah			Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti untuk perumusan kebijakan			Nilai SAKIP Bappeda										
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan
TA.2024 : Rp621.125.000	TA.2024 : Rp120.875.000	TA.2024 : Rp370.000.000	TA.2024 : Rp692.000.000	TA.2024 : Rp220.000.000	TA.2024 : Rp210.000.000	TA.2024 : Rp175.000.000	TA.2024 : Rp105.000.000	TA.2024 : Rp120.000.000	TA.2024 : Rp285.000.000	TA.2024 : Rp437.000.000	TA.2024 : #####	TA.2024 : Rp50.000.000	TA.2024 : Rp420.000.000	TA.2024 : #####	TA.2024 : Rp150.000.000	TA.2024 : Rp629.000.000	TA.2024 : Rp698.185.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang RPJPD, RPJMD dan RKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan
TA.2024 : Rp121.125.000	TA.2024 : Rp95.875.000	TA.2024 : Rp220.000.000	TA.2024 : Rp302.000.000	TA.2024 : Rp220.000.000	TA.2024 : Rp30.000.000	TA.2024 : Rp175.000.000	TA.2024 : Rp105.000.000	TA.2024 : Rp60.000.000	TA.2024 : Rp120.000.000	TA.2024 : Rp77.000.000	TA.2024 : #####	TA.2024 : Rp50.000.000	TA.2024 : Rp110.000.000	TA.2024 : Rp78.000.000	TA.2024 : Rp0	TA.2024 : Rp27.000.000	TA.2024 : Rp331.735.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang RPJPD, RPJMD dan RKPD	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja pada Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja pada Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
TA.2024 : Rp500.000.000	TA.2024 : Rp25.000.000	TA.2024 : Rp150.000.000	TA.2024 : Rp390.000.000	TA.2024 : Rp180.000.000				TA.2024 : Rp60.000.000	TA.2024 : Rp165.000.000	TA.2024 : Rp360.000.000	TA.2024 : Rp360.000.000		TA.2024 : Rp115.000.000	TA.2024 : Rp215.000.000	TA.2024 : Rp150.000.000	TA.2024 : Rp340.000.000	TA.2024 : Rp70.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	TA.2024 : Rp75.000.000										TA.2024 : Rp50.000.000		TA.2024 : Rp62.500.000	TA.2024 : Rp229.000.000		TA.2024 : Rp100.000.000	TA.2024 : Rp85.000.000	
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja pada Perangkat Daerah Bidang SDA										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan /Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
	TA.2024 : Rp25.000.000										TA.2024 : Rp0		TA.2024 : Rp132.500.000	TA.2024 : Rp50.000.000		TA.2024 : Rp162.000.000	TA.2024 : Rp60.000.000	
													Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
													TA.2024 : Rp0			TA.2024 : Rp106.500.000		
													Fasilitasi Kunjungan Tamu			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
													TA.2024 : Rp43.000.000			TA.2024 : Rp44.950.000		
													Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
													TA.2024 : Rp535.000.000					
													Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
													TA.2024 : Rp45.000.000					
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur (PSI)	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD)			Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)			Sekretariat								Penanggung Jawab Kegiatan dan Sub Kegiatan		



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Jend. Basuki Rahmat Komplek Perkantoran Kel.Paal V Kec. Kotabaru - JAMBI - 36128
<http://bappeda.jambikota.go.id> bappeda@jambikota.go.id [bappedakotajambi](https://www.instagram.com/bappedakotajambi)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA JAMBI

NOMOR 042 TAHUN 2023
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi, perlu penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda tentang Penetapan Perencanaan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 20);
9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 20);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 42);
12. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024.**

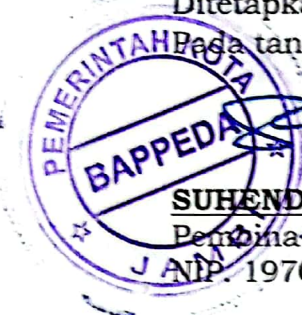
KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menyusun

laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi.

KETIGA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

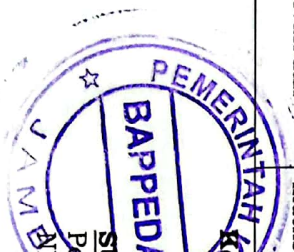
Ditetapkan di : JAMBI
Pada tanggal : 2023



SUHENDRI, SH., M.Si.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19700404 199601 1 002

Lampiran 1: Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi
 Nomor : Tahun 2023
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan
 Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja	Program	Indikator dan Target Kinerja Program	Kegiatan	Indikator dan Target Kinerja Kegiatan	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan (IKPP) (Target : Sangat Baik)	1. Meningkatkan Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Program Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD (Target : 100%)	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD (Target: 100%)	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan Daerah (Target : 100%)
						2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data Pembangunan (Target : 100%)
						3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Evaluasi Daerah (Target : 100%)
						1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Target : 26,82 & 18,64)
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perencanaan dan SDA (Target : 26,99 & 18,32)						
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur (Target : 24,52 & 16,82)						
2. Meningkatkan Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai Capaian Perencanaan dan Pengukuran Kinerja (Target : 22,92 & 17,91)	Program Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Peringkat Daerah (Target: 26,11 & 17,93)	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan untuk perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan (Target : 100%)		
3. Meningkatkan Pemantauan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan (Target : 100%)	Program Penelitian & pengembangan daerah	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti untuk perumusan kebijakan (Target : 100%)	2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan untuk perumusan kebijakan bidang sosial budaya dan kependudukan (Target : 100%)		
				3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan untuk perumusan kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan (Target : 100%)		
				4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Indeks Inovasi Daerah (Target : Nilai 62,75)		


KEPALA BAPPEDA Kota Jambi
SUHENDRI, SH., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700404 199601 1 002

FORMULASI :

- Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan (IKPP) :

$$IKPP = \left(\frac{\% \text{ Realisasi Sasaran RPJMD}}{\% \text{ Target Sasaran RPJMD}} \right) \times 20\% + \left(\frac{\text{Realisasi SAKIP Kota Komponen Perencanaan} + \text{Realisasi SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja}}{\Sigma \text{ Bobot Nilai SAKIP Komponen Perencanaan} + \text{Pengukuran Kinerja}} \right) \times 60\% + \left(\frac{\% \text{ Realisasi hasil Kajian yg dimanfaatkan untuk rumusan kebijakan daerah}}{\% \text{ Target hasil Kajian yg dimanfaatkan untuk rumusan kebijakan daerah}} \right) \times 20\%$$

- Nilai SAKIP Kota pada komponen Perencanaan Kinerja :

Hasil Evaluasi SAKIP Kota Jambi pada Komponen Perencanaan dari Kementerian PAN-RB pada Tahun-n

- Nilai SAKIP Kota pada komponen Pengukuran Kinerja :

Hasil Evaluasi SAKIP Kota Jambi pada Komponen Pengukuran Kinerja dari Kementerian PAN-RB pada Tahun-n

- Persentase Capaian Indikator Sasaran RPJMD :

$$\frac{\% \text{ Capaian Seluruh Indikator Kinerja Sasaran RPJMD}}{\Sigma \text{ Indikator Sasaran yang sudah di rilis}} \times 100\%$$

- Persentase Hasil Kajian yang Ditindaklanjuti untuk Perumusan Kebijakan :

$$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian yg dimanfaatkan untuk rumusan kebijakan daerah}}{\text{Jumlah Dokumen Kajian}} \times 100\%$$

- Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan Daerah

$$\frac{\Sigma \text{ Dokumen Perencanaan Daerah yang disampaikan sesuai Jadwal yang ditetapkan}}{\Sigma \text{ Dokumen Perencanaan Daerah}} \times 100\%$$

- Persentase ketersediaan data Pembangunan

$$\frac{\Sigma \text{ Data yang tersedia}}{\Sigma \text{ Total data yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

- Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Evaluasi Perangkat Daerah

$$\frac{\Sigma \text{ Kesesuaian jadwal penyampaian hasil laporan evaluasi}}{\Sigma \text{ Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

- Nilai SAKIP Perencanaan Bidang "X" yang dinilai Inspektorat Kota Jambi

$$\frac{\Sigma \text{ Perolehan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Komponen Perencanaan Bidang "X"}}{\Sigma \text{ Perangkat Daerah Mitra Kerja Bidang "X"}}$$

- Nilai SAKIP Pengukuran Kinerja Bidang "X" yang dinilai Inspektorat Kota Jambi

$$\frac{\Sigma \text{ Perolehan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Komponen Pengukuran Kinerja Bidang "X"}}{\Sigma \text{ Perangkat Daerah Mitra Kerja Bidang "X"}}$$

- **Persentase hasil kajian yang direkomendasikan untuk perumusan kebijakan bidang "Z"**

$$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian yg diirekomendasikan untuk rumusan kebijakan bidang "Z"}}{\text{Jumlah Dokumen Kajian bidang "Z"}} \times 100\%$$

- **Indeks Inovasi Daerah**

**Nilai Indeks Government Award
dari KEMENDAGRI**



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Jend. Basuki Rahmat Komplek Perkantoran Kel.Paal V Kec. Kotabaru - JAMBI – 36128



<http://bappeda.jambikota.go.id>



bappeda@jambikota.go.id



[bappedakotajambi](#)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA JAMBI

NOMOR 042 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun perencanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 20);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 42);
13. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;

KETIGA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAMBI

Pada tanggal : 24 Agustus 2023



SUHENDRA SH., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700404 199601 1 002